

Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

SKRIPSI



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:

Nama : Diana Purwito Hastitah

Nomor Mahasiswa : 13313260

Jurusan : ILMU EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

**Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014**

SKRIPSI



الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندونيسية

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi, Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Diana Purwito Hastitah

Nomor Mahasiswa : 13313260

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Penulis,



Diana Purwito Hastitah

NIM : 13313260

PENGESAHAN SKRIPSI

Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Nama : Diana Purwito Hastitah

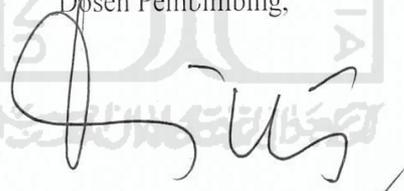
Nomor Mahasiswa : 13313260

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Diana Wijanyanti., S.E., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2014**

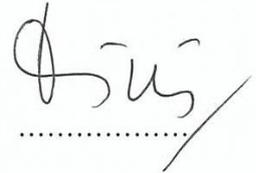
Disusun Oleh : **DIANA PURWITO HASTITAH**

Nomor Mahasiswa : **13313260**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 16 Februari 2017

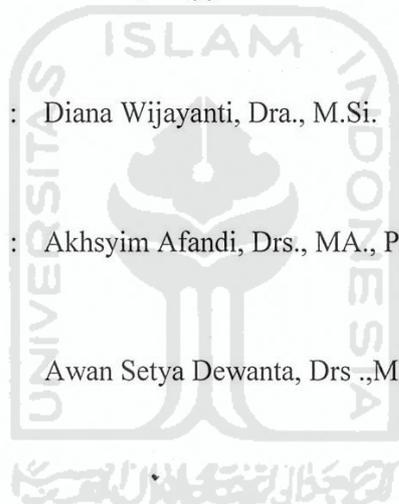
Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.



Penguji : Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D.



Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia ilmu, rahmat serta hidayahnya skripsi dengan judul **“Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kebenaran, lentera kehidupan bagi seluruh umat manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya didunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Diana Wijanyanti,,S.E.,M.Siselaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Seluruh Dosen dan Staf karyawan UII Yogyakarta yang telah mewariskan ilmunya kepada kami dengan tulus.

4. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kehangatan dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa, saya ucapkan banyak terima kasih.
5. Teman –teman KKN unit 337 yang memberikan banyak kenangan dan pelajaran hidup, Atya , Hanny, dia, Fiqi, Fitrio, aditya, danLuthfi
6. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan yang telah memberikan pengalaman serta kenangan selama menjadi mahasiswa, Vebrian Tiara, Yunita, Ika, Dwi Puspa, agil, dan melinda.
7. Teman- teman jurusan ilmu ekonomi FE UII, terimakasih atas sumbangan saran, pemikiran-pemikiran dan motivasi serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini Semoga amal baik kalian dapat menjadi kebaikan untuk hari yang akan datang.
8. Serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebut satu per satu, tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.
Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pun dengan skripsi ini.Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharapkan kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.Dan harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Diana Purwito Hastitah

NIM : 13313260

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Berita Acara Ujian Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstraksi	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Pustaka	13
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Indek Pembangunan Manusia.....	15
2.2.2 Upah Minimum	18
2.2.3 Pengangguran	20
2.2.4 Kemiskinan.....	23

2.2.5	Pertumbuhan Ekonomi	26
2.3	Hubungan Antar Variabel	28
2.3.1	Hubungan Upah Minimum dengan IPM	28
2.3.2	Hubungan Tingkat Pengangguran dengan IPM	28
2.3.3	Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan IPM	29
2.3.4	Hubungan Pertumbuhan ekonomi dengan IPM.....	29
2.4	Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Variable Penelitian Dan Defisi Operasional	31
3.1.1	Variabel Penelitian.....	31
3.1.2	Definisi Operasional	31
3.2	Jenis dan Sumber Data	32
3.3	Metode Analisis	33
3.3.1	Data Panel	33
3.3.2	Model Penelitian	34
3.4	Estimasi Regresi Data Panel.....	34
3.4.1	<i>Pooled Least Square</i> (PLS) atau Metode <i>Common</i>	34
3.4.2	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	34
3.4.3	<i>Random Effect Model</i>	36
3.5	Pemilihan Model	36
3.5.1	Uji LM_Test.....	36
3.5.2	Uji Hausman Test	37
3.5.3	Uji Signifikansi Common Effect Vs Fized Effect	37

3.6	Pengujian Statistik.....	38
3.6.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	38
3.6.2	Uji F.....	39
3.6.3	Uji T.....	39
BAB IV HASIL dan ANALISIS.....		41
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	41
4.2	Deskripsi Objek Data Penelitian.....	41
4.2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	41
4.2.2	Upah Minimum Regional.....	42
4.2.3	Tingkat Pengangguran.....	44
4.2.3	Tingkat Kemiskinan.....	46
4.2.4	Pertumbuhan Ekonomi.....	48
4.3	Persamaan Regresi.....	50
4.4	Hasil Estimasi Data Panel.....	50
4.4.1	Estimasi <i>Pooled Least Square section</i>	50
4.4.2	Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	51
4.4.3	Estimasi <i>Random Effect Model</i>	53
4.5	Pemilihan Model.....	54
4.5.1	<i>Likelihood Ratio Test (Chow Test)</i>	54
4.5.2	<i>Hausman Test</i>	56
4.6	Model terbaik.....	57
4.6.1	Model Random.....	57

4.7 Analisis Hasil Regresi	64
4.7.1 Uji F (Uji Serempak).....	64
4.7.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	64
4.7.3 Uji Statistika T	65
4.8 Pengujian Hipotesis	69
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Implikasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 IPM Indonesia Metode Baru Tahun 2013-2015	3
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	5
Tabel 1.3 Garis Kemiskinan, Penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2010-2016.....	6
Tabel 1.4 Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015.....	9
Tabel 2.1 Nilai Maksimum Dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM.....	17
Tabel 4.1 Upah Minimum Regional aka Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014.....	43
Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Kabupaten Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010- 2014	45
Tabel 4.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota Di Jawa Tenga Tahun 2010- 2014	47
Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010- 2014	49
Tabel 4.5 Estimasi Output Hasil Regresi <i>PLS</i>	51
Tabel 4.6 stimasi Output Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	52
Tabel 4.7 Estimasi Output Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i>	53
Tabel 4.8 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i>	55
Tabel 4.9 Hasil Pengujian <i>Hausman Tes</i>	56
Tabel 5.0 Konstanta Antar Daerah.....	58
Tabel 5.1 Hasil Uji t Statistik	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5 Grafik Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan KHL Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015	10
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Estimasi Output Hasil Regresi PLS	79
Lampiran 2: Estimasi Output Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	80
Lampiran 3: Estimasi Output Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i>	81
Lampiran 4: Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i>	82
Lampiran 5 Hasil Pengujian <i>Hausman Tes Regresi</i>	83
Lampiran 6 Hasil Konstanta Antar Daerah.....	84



ABSTRAKSI

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tiga komponen yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Penelitian bertujuan untuk menganalisa apakah variabel independen yang terdiri atas Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Jawa Tengah 2010-2014

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan data runtut waktu (*time series*) selama lima tahun dari tahun 2010-2014 dan *cross section* sebanyak tiga lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Dinas ketenagakerjaan dan publikasi BPS.

Hasil regresi menggunakan metode data panel *Random effect model* diketahui bahwa variabel Upah Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran , Tingkat Kemiskinan, Dan Pertumbuhan Ekonomi.

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Pembangunan adalah suatu alat untuk mengukur pencapaian suatu bangsa, dan proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam melakukan perubahan untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, berdaya bersaing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan di suatu negara. Pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi adalah target utama untuk negara yang sedang berkembang. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang di produksi masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah seharusnya tidak di artikan secara sempit, hanya dengan menggunakan besaran PDRB ataupun PDRB perkapita sebagai tolak ukur dalam pendekatan, akan tetapi harus melibatkan beberapa indikator lainnya yang dinilai dapat menjadi unsur-unsur pendukung konsep kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Pada saat ini telah banyak berkembang metode pengukuran kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah, salah satunya adalah yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). IPM menggambarkan beberapa komponen yaitu pencapaian umur panjang dan sehat mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partipasi lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita (Feriyanto, 2014)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang terlebih dahulu mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (BPS.2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan ukuran dalam keberhasilan pembangunan aspek manusia dalam suatu wilayah tertentu yang standarnya ditentukan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP (United Nation of Development Program). Ukuran ini selanjutnya disepakati dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia pada suatu wilayah tertentu, seperti negara, provinsi atau Kabupaten/kota.

Pada tabel 1.1 Perkembangan IPM se Indonesia diatas, provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah semakin baik. IPM Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan Ke 13 se Indonesia. dan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 78.99 pada tahun 2015.

Tabel 1.1
IPM Indonesia Metode Baru Tahun 2013-2015

Kabupaten	IPM Metode Baru		
	2013	2014	2015
Aceh	68.3	68.81	69.45
Sumatra Utara	68.36	68.87	69.51
Sumatra Barat	68.91	69.36	69.98
Riau	69.91	70.33	70.84
Jambi	67.76	68.24	68.89
Sumatra Selatan	66.16	66.75	67.46
Bengkulu	67.5	68.06	68.59
Lampung	65.73	66.42	66.95
Kep. Bangka Belitung	67.92	68.27	69.05
Kep. Riau	73.02	73.4	73.75
DKI Jakarta	78.08	78.39	78.99
Jawa Barat	68.25	68.8	69.5
Jawa Tengah	68.02	68.78	69.49
DI Yogyakarta	76.44	76.81	77.59
Jawa Timur	67.55	68.14	68.95
Banten	69.47	69.89	70.27
Bali	72.09	72.48	73.27
Nusa Tenggara Barat	63.76	64.31	65.19
Nusa Tenggara Timur	61.68	62.26	62.67
Kalimantan Barat	64.3	64.89	65.59
Kalimantan Tengah	67.41	67.77	68.53
Kalimantan Selatan	67.17	67.63	68.38
Kalimantan Timur	73.21	73.82	74.17
Kalimantan Utara	67.99	68.64	68.76
Sulawesi Utara	69.49	69.96	70.39
Sulawesi Tengah	65.79	66.43	66.76
Sulawesi Selatan	67.92	68.49	69.15
Sulawesi Tenggara	67.55	68.07	68.75
Gorontalo	64.7	65.17	65.86
Sulawesi Barat	61.53	62.24	62.96
Maluku	66.09	66.74	67.05
Maluku Utara	64.78	65.18	65.91
Papua Barat	60.91	61.28	61.73
Papua	56.25	56.75	57.25
Indonesia	68.31	68.9	69.55

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jawa tengah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,92% per tahun. Dengan demikian memiliki potensi sumber daya manusia yang siap untuk diberdayakan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembangunan daerah secara lebih mandiri. Berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013 – 2018 yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari ditetapkanlah target untuk beberapa indikator utama pembangunan sebagai sasaran yang ingin dicapai salah satunya adalah target pencapaian nilai IPM Jawa Tengah. Dalam menentukan nilai target yang akan dicapai pemerintah daerah akan menggunakan berbagai pertimbangan seperti pencapaian ipm Jawa Tengah pada saat ini.

Pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai ipm kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, yang artinya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah sejalan dengan target pembangunan yang sudah direncanakan. Upaya pemerintah daerah khususnya pemerintah Jawa Tengah untuk mempertahankan pertumbuhan nilai IPM yang positif guna memenuhi pencapaian target IPM dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor ekonomi secara makro maupun faktor lainnya. Berikut adalah nilai ipm Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2014 :

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Metode baru Kabupaten/Kota Jawa Tengah
tahun 2010-2014

Kabupaten/ kota	Indeks Pembangunan Manusia (metode baru)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Cilacap	64.18	64.73	65.72	66.8	67.25
Kabupaten Banyumas	66.87	67.45	68.06	68.55	69.25
Kabupaten Purbalingga	63.61	64.33	64.94	65.53	66.23
Kabupaten Banjarnegara	60.7	61.58	62.29	62.84	63.15
Kabupaten Kebumen	63.08	64.05	64.47	64.86	65.67
Kabupaten Purworejo	68.16	69.11	69.4	69.77	70.12
Kabupaten Wonosobo	62.5	63.07	64.18	64.57	65.2
Kabupaten Magelang	63.28	64.16	64.75	65.86	66.35
Kabupaten Boyolali	68.76	69.14	69.51	69.81	70.34
Kabupaten Klaten	70.76	71.16	71.71	72.42	73.19
Kabupaten Sukoharjo	71.53	72.34	72.81	73.22	73.76
Kabupaten Wonogiri	63.9	64.75	65.75	66.4	66.77
Kabupaten Karanganyar	70.31	71	72.26	73.33	73.89
Kabupaten Sragen	67.67	68.12	68.91	69.95	70.52
Kabupaten Grobogan	64.56	65.41	66.39	67.43	67.77
Kabupaten Blora	63.02	63.88	64.7	65.37	65.84
Kabupaten Rembang	64.53	65.36	66.03	66.84	67.4
Kabupaten Pati	65.13	65.71	66.13	66.47	66.99
Kabupaten Kudus	69.22	69.89	70.57	71.58	72
Kabupaten Jepara	66.76	67.63	68.45	69.11	69.61
Kabupaten Demak	66.02	66.84	67.55	68.38	68.95
Kabupaten Semarang	69.58	70.35	70.88	71.29	71.65
Kabupaten Temanggung	63.08	64.14	64.91	65.52	65.97
Kabupaten Kendal	66.23	66.96	67.55	67.98	68.46
Kabupaten Batang	61.64	62.59	63.09	63.6	64.07
Kabupaten Pekalongan	63.75	64.72	65.33	66.26	66.98
Kabupaten Pemalang	58.64	59.66	60.78	61.81	62.35
Kabupaten Tegal	61.14	61.97	62.67	63.5	64.1
Kabupaten Brebes	59.49	60.51	60.92	61.87	62.55
Kota Magelang	73.99	74.47	75	75.29	75.79
Kota Surakarta	77.45	78	78.44	78.89	79.34
Kota Salatiga	78.35	78.76	79.1	79.37	79.98
Kota Semarang	76.96	77.58	78.04	78.68	79.24
Kota Pekalongan	68.95	69.54	69.95	70.82	71.53
Kota Tegal	69.33	70.03	70.68	71.44	72.2
Provinsi Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78

Sumber : BPS Jawa Tengah

Perkembangan penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun berfluktuatif sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik. Adapun perkembangan penduduk miskin di Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Garis Kemiskinan, Penduduk miskin di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016

Tahun	Garis Kemiskinan/ (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah Ribuan Jiwa	Presentase
Maret 2010	192435	5369.16	16.56
Maret 2011	209611	5137.68	15.72
September 2011	217440	5317.39	16.2
Maret 2012	222327	5051.37	15.34
September 2012	233769	4952.06	14.98
Maret 2013	244161	4834.95	14.56
September 2013	261881	4811.34	14.44
Maret 2014	273056	4836.45	14.46
September 2014	281570	4561.83	13.58
Maret 2015	297851	4577.04	13.58
September 2015	309314	4505.78	13.32
Maret 2016	317348	4506.89	13.27

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka atau (TPT) merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang sudah berpengalaman bekerja atau belum pernah bekerja sama sekali), atau sedang mempersiapkan usahanya, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah memiliki pekerjaan dan seseorang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Bappeda,2011). Tingkat pengangguran adalah presentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi IPM.

Setiap tahun, penduduk selalu membutuhkan suatu pekerjaan dari tahun ke tahun akan semakin bertambah banyak jumlah pencari kerja, akan tetapi dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Besarnya orang yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ketersediaan lapangan pekerjaan untuk itu para pencari kerja harus lebih berkompetisi dan berusaha lebih untuk mencari pekerjaan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Namun jika para pekerja tidak mampu mengimbangi arus kompetisi dalam pencarian kerja, maka akan terselisih dengan mereka yang memiliki kemampuan yang lebih baik, maka pada akhirnya memiliki status sebagai tuna karya, atau lebih umum disebut dengan pengangguran.

Selain itu , faktor komponen penunjang Indeks Pembangunan Manusia adalah peningkatan pendidikan bagi masyarakat. Apabila masyarakat menempuh pendidikan lebih tinggi maka akan terhindar dari pengangguran karena pendidikan yang tinggi dan wawasan yang luas serta memiliki soft skill hard skill untuk

bekerja bersaing di dunia pekerjaan. Ketika tidak dapat pekerjaan atau sedang menganggur maka dengan ilmu yang didapat di sekolah dapat menjadi bekal untuk membuka lapangan usaha.

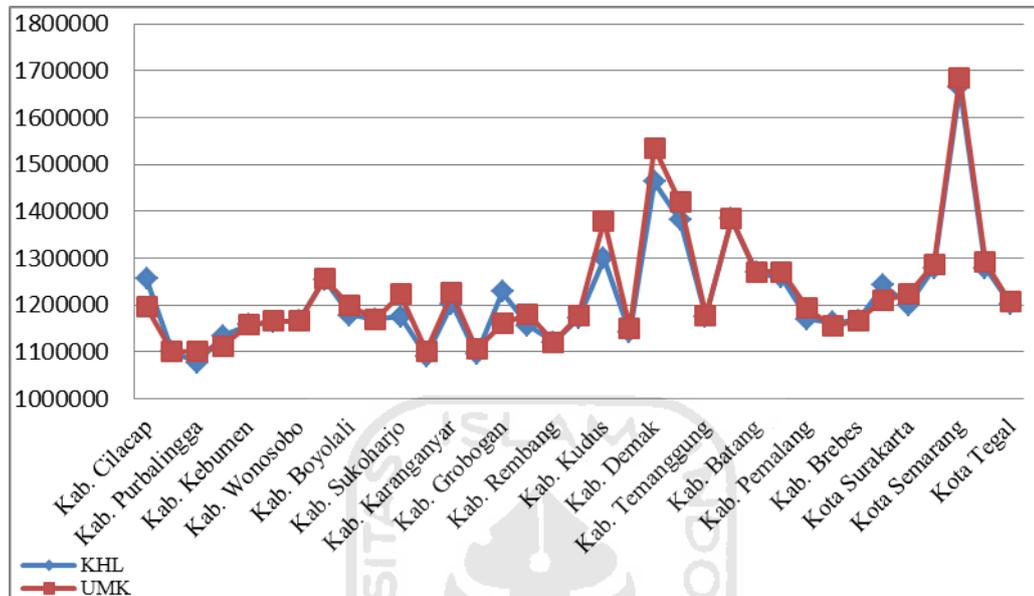
Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu indikator penunjang kesejahteraan dan kemajuan untuk pekerja di suatu wilayah di Kabupaten/Kota tersebut. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah maka menunjukkan semakin tingkat ekonominya dan daya beli di Wilayah tersebut. Upah minimum juga sebagai penunjang kesejahteraan bagi para pekerja di dalam suatu wilayah. Upah minimum standarnya diberikan dalam waktu 1 bulan untuk orang yang sedang bekerja, dimana dalam perhitungan UMR ini adalah pendapatan minimal untuk dapat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disuatu wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Upah minimum regional Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan UMR disetiap tahun, tetapi hal tersebut tidak menunjukan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah, hal ini dapat dilihat dari tingginya Kebutuhan Layak Hidup (KHL) dibandingkan dengan UMK. Selain itu juga masih banyak UMK yang belum diterapkan dalam perusahaan sesuai Prosedur UMK seharusnya. Berikut tabel Kebutuhan Layak Hidup dengan UMK.

Table 1.4
Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2015		Proposi UMK terhadap KLH (%)
	KHL	UMK	
Kab. Cilacap	1255478	1195666	95.24
Kab. Banyumas	1099949	1100000	100
Kab. Purbalingga	1076915	1101600	102.29
Kab. Banjarnegara	1134721	1112500	98.04
Kab. Kebumen	1157104	1157500	100.03
Kab. Purworejo	1164192	1165000	100.07
Kab. Wonosobo	1165683	1166000	100.03
Kab. Magelang	1254848	1255000	100.01
Kab. Boyolali	1177700	1197800	101.71
Kab. Klaten	1169976	1170000	100
Kab. Sukoharjo	1175689	1223000	104.02
Kab. Wonogiri	1089999	1101000	101.01
Kab. Karanganyar	1202151	1226000	101.98
Kab. Sragen	1095000	1105000	100.91
Kab. Grobogan	1228094	1160000	94.46
Kab. Blora	1156492	1180000	102.03
Kab. Rembang	1119953	1120000	100
Kab. Pati	1171391	1176500	100.44
Kab. Kudus	1299159	1380000	106.22
Kab. Jepara	1141244	1150000	100.77
Kab. Demak	1463358	1535000	104.9
Kab. Semarang	1381603	1419000	102.71
Kab. Temanggung	1175426	1178000	100.22
Kab. Kendal	1383445	1383450	100
Kab. Batang	1269000	1270000	100.08
Kab. Pekalongan	1258488	1271000	100.99
Kab. Pemasang	1170000	1193400	102
Kab. Tegal	1163000	1155000	99.31
Kab. Brebes	1166583	1166550	100
Kota Magelang	1241486	1211000	97.54
Kota Surakarta	1199545	1222400	101.91
Kota Salatiga	1279221	1287000	100.61
Kota Semarang	1663917	1685000	101.27
Kota Pekalongan	1278778	1291000	100.96
Kota Tegal	1202157	1206000	100.32

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.5
Grafik Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dan KHL
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Dari data diatas dapat diketahui ada beberapa daerah yang nilai UMK nya masih dibawah KHL yaitu Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Banjarnegara.

Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya. Karena IPM adalah salah satu indikator untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan suatu daerah dalam sebuah pembangunan daerah maka penulis akan mengangkat judul “**Faktor Yang Mempengaruhi IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

4. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, selain itu penulis dapat membandingkan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini merupakan syarat wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Bab ini akan mengkaji pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap IPM. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian, sekaligus memperkuat hasil analisis, adapun penelitian tersebut adalah:

Baeti (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2011". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 sampai dengan 2011, Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel model efek tetap (FEM) dengan metode Generalized Least Square (GLS), variabel independennya yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sedangkan untuk variabel dependen adalah IPM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengangguran negatif dan signifikan terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah.

Mirza (2012) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia DI Jawa Tengah Tahun 2006-2009". Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah menggunakan data skunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS Jateng) khususnya data tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dimana metode ini menggunakan regresi data panel, dengan variabel independent kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal sedangkan untuk dependet adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Chalid dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi RIAU”. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data skunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dimana metode ini menggunakan regresi linier berganda, dengan independent tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum Kabupaten/Kota dan laju pertumbuhan ekonomi sedangkan dependennya adalah IPM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, upah minimum Kabupaten/Kota, laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Maulana dkk (2013) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-

2011” data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel, dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan model fixed effect. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan teknologi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Sebagaimana laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata;
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal;
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan;
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

BPS (2008) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian Pembangunan Manusia berbasis sejumlah komponenn dasar dalam kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun dengan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu : umur panjang sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dari ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, selanjutnya untuk dimensi kesehatan, menggunakan angka umur harapan hidup. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak yang digunakan adalah idikator kemampuan daya beli.

Pada tahun 1990, indikator UNDP yang telah dikembangkannya yaitu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif yang di namakan *Indeks pembangunan manusia* (IPM) atau *Human development indeks* (HDI). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100, semakin mendekati 100, maka idikasi dalam pembangunan manusia akan semakin bagus. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status Pembangunan manusia dalam suatu negara atau wilayah ke dalam 3 hal yaitu :

1. $IPM < 50$ (Rendah)
2. $50 < IPM < 80$ (Menengah)
3. $IPM > 80$ (Tinggi)

IPM merupakan Indeks Komposit yang dihitung sebagai rata-rat sederhana dari 3 indeks dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam

memperluas pilihan. Rumus yang sering dipakai adalah sebagai berikut (UNDP,2004)

Tabel 2.1
Nilai Maksimum Dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1.Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2.Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3.Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
4.Daya Beli	732.720a)	300.000 (1996) 360.000 b) 1999,2002	UNDP menggunakan PDB riil disesuaikan

Sumber: BPS (2009)

IPM dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah tersebut dengan alasan :

1. Indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas manusia menggunakan IPM.
2. IPM digunakan dalam salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup untuk masyarakat.
3. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia memiliki kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
4. IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini satu-satunya indikator paling penting yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Konsep IPM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNDP mengacu pada pengukuran pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yaitu :

1. Angka harapan hidup dapat mengukur pencapaian dalam bidang kesehatan.
2. Standar kehidupan layak, dapat mengukur dengan logaritma normal dari produk domestik bruto perkapita penduduk dalam paritas daya beli.
3. Rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dapat mengukur pencapaian di bidang pendidikan.

2.2.2. Upah Minimum

(Burhanudin 2015) Pengertian dari Upah minimum kota yaitu pada pasal 1 dari peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1999. Upah minimum dapat diartikan sebagai upah bulanan terendah meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum provinsi yaitu upah bulanan dan gaji pokok serta tunjangan untuk karyawan yang sudah ditetapkan oleh gubernur. Dalam kebijakan upah minimum yang tertera dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang isinya sebagai berikut:

1. Upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KLH) sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Upah minimum dapat diterapkan berdasarkan:
 - a. Berdasarkan tempat dan wilayah provinsi kabupaten/kota.
 - b. Berdasarkan tempat dan wilayah provinsi kabupaten/kota. Upah minimum sektoral ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha

beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha indonesia untuk wilayah kabupaten/ kota, dan provinsi.

3. Pengusaha yang memperkerjakan karyawan dilarang untuk membayar upah rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada karyawan. Pengusaha yang tidak mampu untuk membayar upah minimum maka dapat melakukan penangguhan. Penangguhan upah minimum itu sendiri yaitu membebaskan perusahaan untuk melaksanakan upah minimumnya berlaku dalam waktu tertentu.
4. Upah minimum yang sudah ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi dan Bupati / Walikota.

Upah yang diberikan untuk para pengusaha secara teotoris dianggap sebagai harga diri tenaga yang dikorbankan pada pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Upah nominal yaitu upah yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
2. Upah rill yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, diukur dengan banyaknya barang dan jasa yang didapat dari pertukaran tersebut. (Sukirno, 2008:351)

Menurut Iksan (2010), masalah yang dihadapi dalam penepatan upah mininum regional adalah pada metode perhitungannya. Terdapat perbedaan yang nyata dari produktivitas antar sektor. Sektor-sektor yang menggunakan buruh terdidik umumnya sudah membayar upah jauh di atas upah minimum karena hal

ini mencerminkan produktivitas, akan tetapi banyak sektor lain yang produktivitasnya ada di bawah upah minimum sehingga kebijakan upah minimum akan memukul sektor ini yang pada umumnya sektor padat karya.

Menurut Kartasapoetra (1992), tujuan utama penentuan upah minimum yaitu:

- a. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja.
- b. Melindungi kelompok yang kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang memuaskan.
- c. Mendorong kemungkinan diberikan dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja.
- d. Dapat mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan.
- e. Dapat mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.

2.2.3. Pengangguran

(Feriyanto, 2014) Pengangguran adalah sekelompok orang yang termasuk angkatan kerja yang tidak dapat bekerja dan sekelompok orang yang sedang mencari pekerjaan menurut referensi tertentu. Pengangguran tersebut dibedakan menjadi 2 menurut kemauannya yaitu:

1. Pengangguran terpaksa yaitu sekelompok orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, meskipun sekelompok orang tersebut

menerima suatu pekerjaan, akan tetapi dengan tingkat upah yang tidak sesuai dari tingkat upah yang semestinya ditetapkan.

2. Pengangguran suka rela yaitu sekelompok orang yang rela untuk menganggur daripada menerima suatu pekerjaan yang upahnya tidak sesuai dengan apa yang diterima.

Standar pengertian yang ditentukan secara internasional, maksud dari pengangguran itu sendiri adalah orang yang digolongkan dalam angkatan kerja secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, menurut sadono sukirno (2000) pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
2. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan tindakan seseorang pekerja yang meninggalkan suatu pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginannya dari pekerjaan sebelumnya.
3. Pengangguran Konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Memiliki hubungan erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, distribusi pendapatan yang tidak merata dan luasnya kemiskinan. Sebagian besar orang yang hanya bekerja paruh waktu ataupun tidak memiliki pekerjaan yang

tetap selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin, akan tetapi jika mereka bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Seseorang salah jika masih banyak yang menganggap bahwa setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah miskin, sedangkan jika bekerja secara penuh adalah golongan orang kaya. Hal ini karena ada pekerjaan di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka akan menolak pekerjaan jika mereka merasa lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah dalam keuangan mereka.

Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya :

1. Pengangguran Terbuka terjadi karena banyaknya jumlah tenaga kerja dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga masih banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh suatu pekerjaan.
2. Pengangguran Musiman terjadi di masa-masa tertentu biasanya dalam kurun waktu satu tahun. Biasanya fenomena ini terjadi disektor pertanian dimana petani akan menganggur dan menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim panen dan musim tanan.
3. Setengah Menganggur terjadi karena seorang tenaga kerja yang tidak bekerja optimal kurang dari 35 jam dalam seminggu, dan ketiadaan

lapangan pekerjaan atau pekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jam kerja normal di Indonesia adalah 35 jam seminggu.

2.2.4. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan bahwa kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidak mampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori yang digunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum seperti sandang, pangan, papan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan kemiskinan dapat dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dapat diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan atau dibawah garis kemiskinan.

Suryawati (2005) berpendapat bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi banyak juga faktor lainnya seperti pendidikan dan tingkat kesehatan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, dan kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal. Kemiskinan ada 4 yaitu :

1. Kemiskinan relatif, kondisi ini karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau untuk seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan

2. Kemiskinan kultural, kondisi ini mengacu pada persoalan sikap dari seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti pemalas, pemboros, tidak kreatif meskipun sudah ada bantuan dari pihak luar, dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan yang lebih baik lagi.
3. Kimiskinan absolut, kondisi dimana seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan, pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya seperti sandang, papan, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rumah dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja
4. Kemiskinan struktural, kondisi yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Kemiskinan buatan, kemiskinan ini diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak menguasai sarana, sumber daya, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.
2. Kemiskinan alamiah, kemiskinan ini berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam, dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus

Menurut Sumitro Djojohandikusumo dalam skripsi (adhi, 2011) pola dari kemiskinan ada empat yaitu persistent poverty adalah kemiskinan yang sudah kronis atau turun temurun. Pola yang kemiskinan yang kedua yaitu cyclical

poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga yaitu seasonal poverty adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola yang keempat yaitu accidental poverty adalah kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan :

1. Produk domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih suatu barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode. (Sasana, 2006) PDRB dapat menggambarkan kemampuan di suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang sudah dimilikinya. Maka dari itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh setiap daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor daerah tersebut.
2. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia bertempat tinggal pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki pencaharian tetap di daerah tersebut, serta tercatat sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Penyebab Kemiskinan Menurut Kuncoro (2010) adalah :

1. Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, dan selanjutnya upah juga ikut rendah, rendahnya kualitas sumber daya ini muncul karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan.

2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai “kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, menurut Prof. Simon Kurznets kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. 3 definisi komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang, kedua teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, ketiga penggunaan teknologi secara luas dan efisiensi memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan idiologi

sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan,2003).

Menurut Todaro (2000:111) ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, faktor tersebut adalah :

1. Kemajuan teknologi, cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.
2. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada peralatan fisik, tanah, sumber daya manusia dan modal
3. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

Penilaian mengenai cepat lambatnya suatu pertumbuhan ekonomi dapat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di masa lalu dan pencapaian pertumbuhan ekonomi oleh daerah lain Sadono Sukirno, (1994) dalam (farid) dengan kata lain, suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Sedangkan jika dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan terus menerus atau fluktuatif.

Fakto-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sadono sukirno (1994) (dalam farid)yaitu :

1. Tanah dan Kekayaan.
2. Barang Modal dan Tingkat Teknologi.
3. Jumlah, Putu Penduduk dan Tenaga kerja.
4. Sistem Sosial, Sikap masyarakat, Luas Pasar dan Sumber Pertumbuhan.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Upah Minimum Regional dengan Indeks Pembangunan Manusia

Upah minimum berarti upah bulanan dan gaji pokok serta tunjangan yang dibayarkan untuk karyawan yang sudah bekerja disuatu perusahaan. Upah minimum juga dapat meningkatkan taraf kehidupan manusia yang lebih sejahtera dan lebih baik, karena jika upah semakin tinggi maka kemampuan daya beli manusia akan semakin banyak dan dapat mesejahterakan kehidupan manusia itu sendiri, maka kesimpulannya adalah upah dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

2.3.2. Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Sadono Sukirno, 2004) salah satu faktor yang menentukan kemakmuran manusia adalah mengurangi tingkat pengangguran, menurut tingkat pengangguran apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja atau memggangur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kualitas pembangunan manusia. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), agar pemerintah daerah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan sebaik-baiknya maka pemerintah daerah perlu menurunkan tingkat pengangguran sehingga pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3. Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Riana (2012) Kemiskinan dapat menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan secara layak, baik kebutuhan sandang, pangan, papan atau kesehatan karena orang miskin memiliki kemampuan daya beli yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan fisik maupun non fisik. Keadaan tersebut membuat standar hidupnya menjadi rendah. Standar hidup yang rendah dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan manusia, karena standar hidup merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Konsep dari pembangunan manusia terdapat kemajuan manusia atau kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan merupakan kondisi yang berlawanan dengan pembangunan manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berhubungan negatif dengan pembangunan manusia yang di ukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

2.3.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Riana (2012) Pertumbuhan ekonomi yang berarti pertumbuhan output riil di negara atau wilayah. Maka pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan meningkatnya taraf hidup diukur dengan output riil per orang dan kenaikan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat maka akan meningkatkan standar hidup yang lebih baik sehingga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Upah Minimum Regional berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Diduga Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Diduga Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya ialah Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel dari tahun 2010 – 2014.

3.1.2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang dikemukakan oleh penulis antara lain :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y) atau disebut dengan *Human Development Index* (HDI). Ipm adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih baik dan berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data IPM adalah dalam indeks poin. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, maka kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup akan semakin baik
2. Upah Minimum Kota UMK (X1) adalah peran aktif dalam penentuan pendapatan antara modal dengan buruh. Tingkat upah meningkat apabila

suatu harga barang yang dibutuhkan buruh meningkat. Upah Minimum Kota ini dapat diukur dengan menggunakan satuan Rupiah.

3. Tingkat Pengangguran (X2) sebagai adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Tingkat Pengangguran ini dapat diukur dengan menggunakan satuan persen.

4. Tingkat Kemiskinan (X3) tidak mampu untuk memenuhi standar minimum kehidupan. Tingkat kemiskinan ini dapat diukur dengan menggunakan satuan persen.

5. Pertumbuhan Ekonomi (X4) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak dalam satuan persen.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder pada tahun 2010-2014. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder ini telah dikumpulkan kepada lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data

Dalam penelitian ini data dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Jurnal, Dinas Ketenaga kerjaan, Tranmigrasi Kependidikan, penelitian terdahulu, dan literatur – literatur yang terkait dengan penelitian ini.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Data Panel

Menurut Agus Widarjono (2009) data panel adalah gabungan dari kedua data hasil regresi antara data time series dan cross section. data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa daerah dengan waktu yang sama dalam perusahaan dan perorangan. ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan.

Pertama, data panel merupakan gabungan dari dua data time series dan cross section mampu menyediakan data lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul yaitu penghilangan variabel. Maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$i = 1, 2, \dots, N$$

$$t = 1, 2, \dots, T$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N dan T = banyaknya data panel

3.3.2. Model Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk mengukur pengaruh yang merupakan gabungan antara dua data yaitu (data silang) time series dan cross section (data runtut waktu) sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Selanjutnya penggabungan informasi data dari time series dan cross section. Analisis data dengan regresi tersebut menggunakan bantuan program *Eviews 6*. Untuk melakukan regresi pada variabel maka peneliti menggunakan 3 (tiga) metode. Yaitu: *common effect, fixed effect dan random effect*.

3.4. Estimasi Regresi Data Panel

3.4.1 *Pooled Least Square (PLS) Atau Metode Common*

(Widarjono, 2009). Tujuan dari Regresi *Common Effect* merupakan teknik yang sederhana untuk mengestimasi data panel, dengan cara menggabungkan data cross section dan time series tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model dapat diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* (Widarjono, 2009). Model persamaan regresinya dalam bentuk linier adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.4.2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model (*fixed effect*) ini adalah suatu regresi yang menunjukkan perbedaan obyek dengan konstanta antar obyek (Sriyana, 2014), ada 2 asumsi yang terdapat pada model regresi (*fixed effect*) adalah :

1. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit

Intersep suatu hasil regresi sangat mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu, pada pendekatan (*fixed effect*) metode dapat dilakukan dengan variable semu (*dummy*) untuk menjelaskan adanya perbedaan antar intersep. Model ini dapat di regresi dengan teknik *least squares dummy variabels* (LSDV)

2. Asumsi slope konstan pada intersep bervariasi antar individu/unit dan antar periode waktu, Pendekatan dari metode estimasi regresi data panel ini adalah asumsi tentang intersep yang berubah baik antar individu atau antar analisis maupun antar waktu, namun slope masih diasumsikan konstan/sama.

Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + U_{it}$$

$$i = 1, \dots, N \text{ dan } t = 1, \dots, K$$

keterangan :

Y_{it} = variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i

α_i = intersep yang berubah – ubah antar unit cross section

X_{it}^j = variabel bebas ke-j di waktu t untuk unit cross section i

β_j = parameter untuk variabel bebas ke-j

U_{it} = komponen error di waktu t untuk unit cross section i

Keputusan memasukan variabel boneka (D_i) pada pendekatan fixed effect tidak dapat dipungkiri akan mengurangi jumlah degree of freedom yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

3.4.3 *Random Effect Model*

Widarjono (2013) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel dummy di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter tersebut. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) dikenal sebagai metode *random effect*. Persamaan model *random effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it}^j + u_{it} \rightarrow u_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

$$i = 1, \dots, N \text{ dan } t = 1, \dots, K$$

Pendekatan efek acak dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada pendekatan efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter hasil estimasi akan menjadi semakin efisien.

3.5 Pemilihan Model

Sebelum dilakukan pembahasan hasil model regresi panel data, akan dilakukan pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar melakukan analisis. Dalam pemilihan model dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) LM_test adalah pengujian untuk memilih PLS atau Random effect
- 2) Uji Hausman digunakan untuk memilih fixed effect atau random effect

3.5.1. Uji LM_Test

LM_Test adalah pengujian untuk memilih model PLS atau model random effect. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

$$H_0: \text{Model PLS (Restricted)}$$

H1: Model Random effect (Unrestricted)

Formulasi untuk menguji hipotesa diatas dengan menggunakan tabel distribusi chi_squares seperti yang dirumuskan oleh Breusch_Pagan :

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{\epsilon}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{\epsilon}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

$$= \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (T \bar{\epsilon}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{\epsilon}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

n = jumlah individu; T = jumlah periode waktu dan $\hat{\epsilon}$ adalah residual metode OLS.

Jika nilai LM_Test (χ^2 Stat) hasil pengujian lebih besar dari χ^2 Tabel, maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang kita gunakan adalah model random effect dan sebaliknya.

3.5.2. Uji Hausman Test

Uji hausman digunakan untuk memilih model fixed effect atau random effect. Gujarati (2012) menerangkan hipotesis nol yang mendasari uji Hausman adalah bahwa estimator-estimator FEM dan REM tidak memiliki perbedaan yang besar. Uji statistik yang dikembangkan oleh Hausman memiliki distribusi χ^2 asimtotis. Jika hipotesis nol ditolak maka kesimpulannya adalah REM tidak tepat karena random-effects kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam hal ini, FEM lebih baik daripada REM.

3.5.3. Uji Signifikansi Common Effect Vs Fixed Effect

Uji F kita gunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi *common effect*.

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U / q}{SSR_U / (n - k)}$$

SSR_R dan SSR_U *sum of Squared residuals* metode *common effect* dan teknik *fixed effect*. q jumlah restriksi metode *common effect* dan n jumlah observasi dan k jumlah parameter estimasi metode *fixed effect*.

3.6 . Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (Uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji T).

3.6.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar R^2 , semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen (Gujarati, 2003).

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

- 1) Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil R^2 , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
- 2) Untuk mengukur proporsi/persentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x terhadap variabel y untuk mengukur proporsi/persentase dari jumlah

variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x terhadap variabel y.

3.6.2. Uji F

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan statistik uji F. Statistik uji F mengikuti distribusi F dengan derajat bebas sebanyak (k-1) untuk numerator dan (n-k) untuk denominator, dimana k merupakan banyaknya parameter termasuk intersep/konstanta, sedangkan n adalah banyaknya observasi (Widarjono, 2007). Kriteria uji F tersebut adalah sebagai berikut: pada taraf uji α , jika nilai statistik uji F (Fhitung) lebih besar dari nilai F kritis ($F_{\alpha;(k-1),(n-k)}$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya jika nilai statistik uji F (Fhitung) lebih kecil dari nilai F kritis ($F_{\alpha;(k-1),(n-k)}$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulan yang diambil adalah: jika H_0 ditolak, maka ada variabel independen yang berpengaruh. Tetapi jika H_0 diterima, berarti semua variabel independen tidak berpengaruh..

3.6.3. Uji T

Uji t statistik ini bertujuan untuk menguji seberapa pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :

$$H_0: \beta_0 = 0$$

Artinya apakah variabel independen tersebut bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya adalah :

$$H_a: \beta_1 \neq 0$$

Artinya apakah variabel independen tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung, jika nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dan sebaliknya, jika nilai t hitung $<$ t tabel maka H_1 ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil analisis dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara time series dan cross. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 tahun secara berurutan dari tahun 2010-2014 dengan mencakup 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini berupa alat bantu *Econometric E-Views 8*. Penelitian ini menggunakan analisis secara ekonometrik.

4.2 Diskripsi objek data penelitian

4.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

BPS (2008) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian Pembangunan Manusia berbasis sejumlah komponenn dasar dalam kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun dengan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu : umur panjang sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dari ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, selanjutnya untuk dimensi kesehatan, menggunakan angka umur harapan hidup. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak yang digunakan adalah indikator kemampuan daya beli.

4.2.2. Upah Minimum regional

Upah minimum kota yaitu pada pasal 1 dari peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1999. Upah minimum dapat diartikan sebagai upah bulanan terendah meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum provinsi yaitu upah bulanan dan gaji pokok serta tunjangan untuk karyawan yang sudah ditetapkan oleh gubernur.

Tabel 4.1 menunjukkan data upah minimum regional kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2014. upah minimum regional di wilayah tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. upah minimum regional tertinggi terjadi pada kota Semarang pada tahun 2014 sebesar Rp 1.280.000. Tingkat upah minimum regional terendah terjadi di kabupaten Purworejo sebesar Rp 910.000 kemudian kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 920.000. Peningkatan upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja/ masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Tabel 4.1
Upah Minimum Regional Kabupaten Kota Di Jawa Tengah
Tahun 2010 -2014

Kabupaten / kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Cilacap	760000	790000	852000	986000	1125000
Kabupaten Banyumas	670000	750000	795000	877500	1000000
Kabupaten Purbalingga	695000	765000	818500	896500	1023000
Kab. Banjarnegara	662000	730000	765000	835000	920000
Kabupaten Kebumen	700000	727500	770000	835000	975000
Kabupaten Purworejo	719000	755000	809000	849000	910000
Kabupaten Wonosobo	715000	775000	825000	880000	990000
Kabupaten Magelang	752000	802500	870000	942000	1152000
Kabupaten Boyolali	748000	800500	836000	895000	1116000
Kabupaten Klaten	735000	766022	812000	871500	1026600
Kabupaten Sukoharjo	769500	790500	843000	902000	1150000
Kabupaten Wonogiri	769500	790500	843000	902000	1150000
Kabupaten Karanganyar	761000	801500	846000	896500	1060000
Kabupaten Sragen	724000	760000	810000	864000	960000
Kabupaten Grobogan	687500	735000	785000	842000	935000
Kabupaten Blora	742000	816200	855500	932000	1009000
Kabupaten Rembang	702000	757600	816000	896000	985000
Kabupaten Pati	733000	769550	837500	927600	1013027
Kabupaten Kudus	775000	840000	889000	990000	1150000
Kabupaten Jepara	702000	758000	800000	875000	1000000
Kabupaten Demak	813400	847987	893000	995000	1280000
Kabupaten Semarang	824000	880000	941600	1051000	1208200
Kab. Temanggung	709500	779000	866000	940000	1050000
Kabupaten Kendal	780000	843750	904500	953100	1206000
Kabupaten Batang	745000	805000	880000	970000	1146000
Kabupaten Pekalongan	760000	810000	873000	962000	1165000
Kabupaten Pemasang	675000	725000	793000	908000	1066000
Kabupaten Tegal	687000	725000	780000	850000	1000000
Kabupaten Brebes	681000	717000	775000	859000	1000000
Kota Magelang	745000	795000	837000	901500	1037000
Kota Surakarta	785000	826252	864450	915900	1145000
Kota Salatiga	803185	843469	901396	974000	1170000
Kota Semarang	939756	961323	991500	1209100	1423500
Kota Pekalongan	760000	810000	895500	980000	1165000
Kota Tegal	700000	735000	795000	860000	1044000

Sumber : Dinas Ketenagaan dan Tranmigrasi

4.2.3. Tingkat Pengangguran

Pengangguran adalah sekelompok orang yang termasuk angkatan kerja yang tidak dapat bekerja dan sekelompok orang yang sedang mencari pekerjaan menurut referensi tertentu (Feriyanto, 2014).

Standar pengertian yang ditentukan secara internasional, maksud dari pengangguran itu sendiri adalah orang yang digolongkan dalam angkatan kerja secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai apa yang diinginkan pekerja sesuai jenjang pendidikan yang sudah ditempuh untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan harapan.

Tabel 4.2 menunjukkan data tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2014. tingkat pengangguran di wilayah tersebut mengalami fluktuasi setiap tahunnya meskipun cenderung menurun. tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada kota Tegal pada tahun 2011 sebesar 14,22% kemudian kota Magelang dan tingkat pengangguran terendah terjadi di kabupaten Temanggung pada tahun 2014 sebesar 3,19%. Adanya fluktuasi pada tingkat pengangguran di Jawa Tengah antar periode walaupun setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah harus lebih berusaha untuk terus menurunkan angka pengangguran dalam menangani pengangguran di wilayahnya meskipun pada beberapa wilayah tingkat pengangguran masih tergolong tinggi.

Tabel 4.2
Tingkat Pengangguran Kabupaten Kota Di Jawa Tengah
Tahun 2010 -2014

Kabupaten / kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Cilacap	9.75	10.82	7.29	6.68	5.65
Kabupaten Banyumas	7.37	6.61	5.11	5.45	5.37
Kabupaten Purbalingga	3.82	5.1	5.02	5.63	5.13
Kabupaten Banjarnegara	3.1	4.97	3.69	4.16	4.06
Kabupaten Kebumen	8.02	4.73	3.58	3.52	3.25
Kabupaten Purworejo	3.4	5.3	3.2	5.15	5.1
Kabupaten Wonosobo	4.04	4.92	5.21	5.82	5.34
Kabupaten Magelang	2.97	6.83	4.38	6.13	7.45
Kabupaten Boyolali	3.9	5.81	4.43	5.44	4.95
Kabupaten Klaten	4.5	7.63	3.7	5.34	4.75
Kabupaten Sukoharjo	7.4	6.27	6.1	5.98	4.6
Kabupaten Wonogiri	4.7	3.82	3.46	3.61	3.45
Kabupaten Karanganyar	6.62	5.78	5.82	3.84	3.54
Kabupaten Sragen	4.09	8.43	5.88	5.63	6.04
Kabupaten Grobogan	4.6	5.33	4.2	6.1	4.25
Kabupaten Blora	5.49	6.9	4.75	6.23	4.3
Kabupaten Rembang	4.89	7.22	5.75	5.97	5.23
Kabupaten Pati	6.22	11.17	11.98	7.29	6.37
Kabupaten Kudus	6.22	8.32	5.89	8.07	5.03
Kabupaten Jepara	4.56	5.48	4.29	6.34	5.09
Kabupaten Demak	5.69	5.03	8.4	7.08	5.17
Kabupaten Semarang	6.25	6.16	4.87	3.9	4.38
Kabupaten Temanggung	3.6	3.54	3.39	4.87	3.19
Kabupaten Kendal	5.57	6.54	6.31	6.43	6.15
Kabupaten Batang	6.48	6.66	5.88	7.02	7.42
Kabupaten Pekalongan	4.04	6.91	5.08	4.78	6.03
Kabupaten Pemalang	11.45	7.37	4.85	6.48	7.44
Kabupaten Tegal	7.48	10.59	6.12	6.89	8.47
Kabupaten Brebes	8.21	11.08	8.22	9.61	9.53
Kota Magelang	13.28	11.51	8.99	6.75	7.38
Kota Surakarta	8.73	7.7	6.29	7.22	6.16
Kota Salatiga	10.22	9.02	6.84	6.21	4.46
Kota Semarang	8.98	7.65	6.01	6.02	7.76
Kota Pekalongan	7	8.06	7.67	5.28	5.42
Kota Tegal	14.22	9.77	8.75	9.32	9.2

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

4.2.4. Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan bahwa kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidak mampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori yang digunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum seperti sandang, pangan, papan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan kemiskinan dapat dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dapat diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan atau dibawah garis kemiskinan.

Tabel 4.3 menunjukkan data tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2014. tingkat kemiskinan di wilayah tersebut cenderung mengalami penurunan meskipun pada tahun 2011 ada beberapa kabupaten yang mengalami peningkatan . tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada kabupaten wonosobo pada tahun 2011 sebesar 24,21% dan tingkat kemiskinan terendah terjadi di kota Semarang pada tahun 2014 sebesar 5,04%. Adanya penurunan pada tingkat kemiskinan di Jawa Tengah antar periode nya menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan di wilayahnya meskipun pada beberapa wilayah tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi.

Tabel 4.3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota Di Jawa Tengah
Tahun 2010 -2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Cilacap	18.11	17.15	15.92	15.24	14.21
Kab. Banyumas	20.2	21.11	19.44	18.44	17.45
Kab. Purbalingga	24.58	23.06	21.19	20.53	19.75
Kab. Banjarnegara	19.17	20.38	18.87	18.71	17.77
Kab. Kebumen	22.71	24.06	22.4	21.32	20.5
Kab. Purworejo	16.61	17.51	16.32	15.44	14.41
Kab. Wonosobo	23.16	24.21	22.5	22.08	21.42
Kab. Magelang	14.14	15.18	13.97	13.96	12.98
Kab. Boyolali	13.72	14.97	13.88	13.27	12.36
Kab. Klaten	17.47	17.95	16.71	15.6	14.56
Kab. Sukoharjo	10.94	11.13	10.16	9.87	9.18
Kab. Wonogiri	15.68	15.74	14.67	14.02	13.09
Kab. Karanganyar	13.98	15.29	14.07	13.58	12.62
Kab. Sragen	17.49	17.95	16.72	15.93	14.87
Kab. Grobogan	17.86	17.38	16.14	14.87	13.86
Kab. Blora	16.27	16.24	15.11	14.64	13.66
Kab. Rembang	23.41	23.71	21.88	20.97	19.5
Kab. Pati	14.48	14.69	13.61	12.94	12.06
Kab. Kudus	9.02	9.45	8.63	8.62	7.99
Kab. Jepara	10.18	10.32	9.38	9.23	8.55
Kab. Demak	18.76	18.21	16.73	15.72	14.6
Kab. Semarang	10.5	10.3	9.4	8.51	8.05
Kab. Temanggung	13.46	13.38	12.32	12.42	11.55
Kab. Kendal	14.47	14.26	13.17	12.68	11.8
Kab. Batang	14.67	13.47	12.4	11.96	11.13
Kab. Pekalongan	16.29	15	13.86	13.51	12.57
Kab. Pemasang	19.96	20.68	19.28	19.27	18.44
Kab. Tegal	13.11	11.54	10.75	10.58	9.87
Kab. Brebes	23.01	22.72	21.12	20.82	20
Kota Magelang	10.51	11.06	10.31	9.8	9.14
Kota Surakarta	13.96	12.9	12.01	11.74	10.95
Kota Salatiga	8.28	7.8	7.11	6.4	5.93
Kota Semarang	5.12	5.68	5.13	5.25	5.04
Kota Pekalongan	9.37	10.04	9.47	8.26	8.02
Kota Tegal	10.62	10.81	10.04	8.84	8.54

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

4.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai “kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, menurut Prof. Simon Kurznets kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. 3 definisi komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang, kedua teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, ketiga penggunaan teknologi secara luas dan efisiensi memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan,2003).

Tabel 4.4 menunjukan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2014. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mengalami fluktuasi setiap periodenya. laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kabupaten banyumas pada tahun 2013 sebesar 6,89%. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada periode 2010-2014 bernilai positif, yang artinya bahwa kegiatan perekonomian di wilayah tersebut mengalami peningkatan.

Tabel 4.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Jawa Tengah
Tahun 2010 -2014

Kabupaten/ kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Cilacap	5.65	4.07	1.98	2.09	2.96
Kabupaten Banyumas	5.77	6.61	5.88	6.89	4.78
Kabupaten Purbalingga	5.67	5.67	5.79	5.61	5.73
Kabupaten Banjarnegara	4.89	5.44	5.23	5.26	5.07
Kabupaten Kebumen	4.15	6.15	4.88	4.65	5.8
Kabupaten Purworejo	5.64	5.64	4.59	5.11	4.63
Kabupaten Wonosobo	4.29	5.37	4.7	5.25	4.16
Kabupaten Magelang	4.51	6.68	4.88	6.3	4.87
Kabupaten Boyolali	3.6	6.34	5.33	5.83	5.04
Kabupaten Klaten	1.73	6.29	5.71	6.27	5.38
Kabupaten Sukoharjo	4.65	5.88	5.9	5.78	5.26
Kabupaten Wonogiri	3.14	3.58	5.94	4.79	5.26
Kabupaten Karanganyar	5.42	4.95	5.72	5.69	5.12
Kabupaten Sragen	6.06	6.55	6.12	6.71	5.59
Kabupaten Grobogan	5.05	3.19	5.08	4.55	4.03
Kabupaten Blora	5.19	4.42	4.9	5.36	4.39
Kabupaten Rembang	4.45	5.19	5.32	5.41	5.15
Kabupaten Pati	5.11	5.91	5.93	5.9	4.54
Kabupaten Kudus	4.16	4.24	4.11	4.53	4.26
Kabupaten Jepara	4.52	4.92	5.86	5.25	4.64
Kabupaten Demak	4.12	5.39	4.46	5.27	4.27
Kabupaten Semarang	6.27	6.27	6.03	6.87	6
Kabupaten Temanggung	4.31	6.09	4.27	6.14	5.15
Kabupaten Kendal	5.95	6.57	5.21	5.93	5.1
Kabupaten Batang	4.97	6.12	4.62	5.84	5.31
Kabupaten Pekalongan	4.27	5.66	4.81	5.99	4.92
Kabupaten Pemasang	4.94	5.01	5.32	5.53	5.52
Kabupaten Tegal	4.83	6.39	5.23	6.75	5
Kabupaten Brebes	4.94	6.65	4.58	5.97	5.32
Kota Magelang	6.12	6.11	5.37	6.04	4.88
Kota Surakarta	5.94	6.42	5.58	6.17	5.24
Kota Salatiga	5.01	6.58	5.53	6.27	4.8
Kota Semarang	5.87	6.58	5.97	6.64	5.3
Kota Pekalongan	5.51	5.49	5.61	5.91	5.48
Kota Tegal	4.61	6.47	4.21	5.45	5.03

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

4.3. Persamaan Regresi

Berikut ini persamaan regresi liner berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1(X_1)_{it} + \beta_2(X_2)_{it} + \beta_3(X_3)_{it} + \beta_4(X_4)_{it} + e$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

X_1 = Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)

X_2 = Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

X_3 = Tingkat Kemiskinan (Persen)

X_4 = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

β_0 = Konstanta Regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

e = Kesalahan Pengganggu

4.4 Hasil Estimasi Data Panel

4.4.1. Estimasi *Pooled Least Square section*

Hasil pegujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Pooled Least Square* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5**Estimasi Output Hasil Regresi PLS**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/02/16 Time: 10:44				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.79711	3.219898	21.05567	0.0000
X1	5.15E-06	2.20E-06	2.341029	0.0204
X2	0.029954	0.133581	0.224238	0.8228
X3	-0.588803	0.065870	-8.938873	0.0000
X4	0.775739	0.300792	2.578984	0.0108
R-squared	0.473080	Mean dependent var	68.02234	
Adjusted R-squared	0.460682	S.D. dependent var	4.765990	
S.E. of regression	3.500062	Akaike info criterion	5.371594	
Sum squared resid	2082.574	Schwarz criterion	5.462016	
Log likelihood	-465.0144	Hannan-Quinn criter.	5.408272	
F-statistic	38.15738	Durbin-Watson stat	0.052951	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.8, 2016.

Dari hasil pengolahan regresi data panel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.473080, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 473080% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model.

4.4.2 Estimasi *Fixed Effect Model*

Hasil pegujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Estimasi Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/02/16 Time: 10:45				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.48125	1.068568	63.15108	0.0000
X1	4.80E-06	4.36E-07	10.99189	0.0000
X2	-0.017799	0.023818	-0.747276	0.4562
X3	-0.321718	0.050003	-6.433986	0.0000
X4	0.214405	0.043188	4.964509	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994885	Mean dependent var	68.02234	
Adjusted R-squared	0.993456	S.D. dependent var	4.765990	
S.E. of regression	0.385544	Akaike info criterion	1.125259	
Sum squared resid	20.21559	Schwarz criterion	1.830555	
Log likelihood	-59.46020	Hannan-Quinn criter.	1.411347	
F-statistic	696.1414	Durbin-Watson stat	1.382887	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.8, 2016.

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.994885, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 99.4885% terhadap variabel dependent. Hasil estimasi diatas menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian.

4.4.3. Estimasi *Random Effect Model*

Hasil pegujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Estimasi Output Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y					
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)					
Date: 12/02/16 Time: 10:46					
Sample: 2010 2014					
Periods included: 5					
Cross-sections included: 35					
Total panel (balanced) observations: 175					
Swamy and Arora estimator of component variances					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	68.12983	1.185665	57.46126	0.0000	
X1	4.57E-06	4.21E-07	10.85001	0.0000	
X2	-0.015093	0.023745	-0.635649	0.5259	
X3	-0.355638	0.047181	-7.537801	0.0000	
X4	0.218565	0.043141	5.066302	0.0000	
Effects Specification				S.D.	Rho
Cross-section random			3.599666	0.9887	
Idiosyncratic random			0.385544	0.0113	
Weighted Statistics					
R-squared	0.847195	Mean dependent var	3.254471		
Adjusted R-squared	0.843600	S.D. dependent var	0.982771		
S.E. of regression	0.388661	Sum squared resid	25.67976		
F-statistic	235.6323	Durbin-Watson stat	1.107441		
Prob(F-statistic)	0.000000				
Unweighted Statistics					
R-squared	0.398622	Mean dependent var	68.02234		
Sum squared resid	2376.858	Durbin-Watson stat	0.011965		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.8, 2016.

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.847195, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 847195% terhadap variabel dependent. Hasil estimasi diatas menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian.

4.5. Pemilihan Model

Karena data yang dianalisis merupakan data panel, maka harus ditentukan metode pendekatan analisis. Pendekatan analisis panel data yang diuji adalah pendekatan *pooled least square*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*) melalui uji Chow untuk memilih antara pendekatan *pooled least square* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan uji Hausman untuk memilih antara pendekatan efek tetap (*fixed effect*) atau efek acak (*random effect*) sehingga mendapatkan pendekatan yang paling tepat terhadap model.

4.5.1. Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Likelihood ratio test dilakukan untuk mengetahui apakah model yang lebih baik untuk digunakan adalah pendekatan *pooled least square (common effect)* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-statistic dengan hipotesis :

$H_0 = Pooled Least Square (common)$ lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

$H_1 = Fixed Effect Model$ lebih baik daripada *Pooled Least Square (common)*.

Hasil *Likelihood ratio test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: FE				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	408.072816	(34,136)	0.0000	
Cross-section Chi-square	811.108499	34	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 12/02/16 Time: 10:48 Cow				
Sample: 2010 2014 Periods included: 5 Cross-sections included: 35 Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.79711	3.219898	21.05567	0.0000
X1	5.15E-06	2.20E-06	2.341029	0.0204
X2	0.029954	0.133581	0.224238	0.8228
X3	-0.588803	0.065870	-8.938873	0.0000
X4	0.775739	0.300792	2.578984	0.0108
R-squared	0.473080	Mean dependent var	68.02234	
Adjusted R-squared	0.460682	S.D. dependent var	4.765990	
S.E. of regression	3.500062	Akaike info criterion	5.371594	
Sum squared resid	2082.574	Schwarz criterion	5.462016	
Log likelihood	-465.0144	Hannan-Quinn criter.	5.408272	
F-statistic	38.15738	Durbin-Watson stat	0.052951	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.8, 2016.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan dari hasil uji *Chow* adalah menolak H_0 , sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan daripada *Pooled Least Square (common effect)*.

4.5.2. Hausman Test

Hausman test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis :

$H_0 = \text{Random Effect Model}$ lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$ lebih baik daripada *Random Effect Model*.

Apabila diketahui dari nilai statistik hausman memiliki nilai probabilitas $\leq \alpha$ tertentu maka:

$H_0 = \text{ditolak}$; $H_1 = \text{diterima}$,

Jika nilai dari probabilitas $\geq \alpha$ tertentu,

$H_0 = \text{diterima}$; $H_1 = \text{ditolak}$

Hasil pengujian *Hausman Test* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Hausman Tes

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.760114	4	0.1491

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.8, 2016.

Dari hasil olah data diatas menunjukkan nilai statistik uji hausman memiliki probabilitas sebesar $0.1491 \geq \alpha = 5\%$, berarti dapat di simpulkan bahwa H_0

diterima dan H_1 ditolak dengan demikian metode estimasi *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect Model*

4.6 Model Terbaik

4.6.1 Model Random Effect

Hasil pengujian regresi Uji cow dengan Hausman, model terbaik menggunakan Model Random, hasil Model Random sebagai berikut:

Tabel 4.7

Random Effect

Dependent Variable: Y					
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)					
Periods included: 5					
Cross-sections included: 35					
Total panel (balanced) observations: 175					
Swamy and Arora estimator of component variances					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	68.12983	1.185665	57.46126	0.0000	
X1	4.57E-06	4.21E-07	10.85001	0.0000	
X2	-0.015093	0.023745	-0.635649	0.5259	
X3	-0.355638	0.047181	-7.537801	0.0000	
X4	0.218565	0.043141	5.066302	0.0000	
Effects Specification				S.D.	Rho
Cross-section random				3.599666	0.9887
Idiosyncratic random				0.385544	0.0113
Weighted Statistics					
R-squared	0.847195	Mean dependent var	3.254471		
Adjusted R-squared	0.843600	S.D. dependent var	0.982771		
Unweighted Statistics					
R-squared	0.398622	Mean dependent var	68.02234		
Sum squared resid	2376.858	Durbin-Watson stat	0.011965		

Sumber Hasil Pengolahan data evIEWS.

Tabel 5.0

Konstanta Antar Daerah

Kabupaten/Kota	CROSSID	Effect	C	KONSTANTA
Kab. Cilacap	1	-1.393.597	68.12983	66.736233
Kab. Banyumas	2	1.815.169	68.12983	69.944999
Kab. Purbalingga	3	-0.44906	68.12983	67.68077
Kab. Banjarnegara	4	-3.907.771	68.12983	64.222059
Kab. Kebumen	5	-0.524352	68.12983	67.605478
Kab. Purworejo	6	2.166.563	68.12983	70.296393
Kab. Wonosobo	7	-0.950375	68.12983	67.179455
Kab. Magelang	8	-3.485.626	68.12983	64.644204
Kab. Boyolali	9	1.142.184	68.12983	69.272014
Kab. Klaten	10	4.678.290	68.12983	72.80812
Kab. Sukoharjo	11	3.058.614	68.12983	71.188444
Kab. Wonogiri	12	-1.984.039	68.12983	66.145791
Kab. Karanganyar	13	3.875.125	68.12983	72.004955
Kab. Sragen	14	1.769.327	68.12983	69.899157
Kab. Grobogan	15	-0.646245	68.12983	67.483585
Kab. Blora	16	-3.067.027	68.12983	65.062803
Kab. Rembang	17	0.856814	68.12983	68.986644
Kab. Pati	18	-2.199.814	68.12983	65.930016
Kab. Kudus	19	0.552398	68.12983	68.682228
Kab. Jepara	20	-1.229.870	68.12983	66.89996
Kab. Demak	21	0.044767	68.12983	68.174597
Kab. Semarang	22	0.222882	68.12983	68.352712
Kab. Temanggung	23	-3.958.155	68.12983	64.171675
Kab. Kendal	24	-1.419.284	68.12983	66.710546
Kab. Batang	25	-5.823.037	68.12983	62.306793
Kab. Pekalongan	26	-2.868.994	68.12983	65.260836
Kab. Pemasang	27	-5.373.775	68.12983	62.756075
Kab. Tegal	28	-6.276.657	68.12983	61.853173
Kab. Brebes	29	-4.140.798	68.12983	63.989032
Kota Magelang	30	5.332.071	68.12983	73.461901
Kota Surakarta	31	9.327.974	68.12983	77.457804
Kota Salatiga	32	8.077.903	68.12983	76.207733
Kota Semarang	33	5.552.466	68.12983	73.682296
Kota Pekalongan	34	-0.099516	68.12983	68.030314
Kota Tegal	35	1.325.446	68.12983	69.455276

Sumber: olahan Data Eviews 8

Dibawah ini hasil persamaan regresi masing – masing kabupaten :

- Kabupaten Cilacap

$$Y_{it} = 66.736233 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

- Kabupaten Bayumas

$$Y_{it} = 69.944999 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Purbalingga

$$Y_{it} = 67.68077 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten banjar

$$Y_{it} = 64.222059 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupeten kebumen

$$Y_{it} = 67.605478 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten purworejo

$$Y_{it} = 70.296393 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Wonosobo

$$Y_{it} = 67.179455 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Magelang

$$Y_{it} = 64.644204 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Boyolali

$$Y_{it} = 69.272014 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Klaten

$$Y_{it} = 72.80812 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Sukoharjo

$$Y_{it} = 71.188444 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Wonogiri

$$Y_{it} = 66.145791 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Karanganyar

$$Y_{it} = 72.004955 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Sragen

$$Y_{it} = 69.899157 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Grobogan

$$Y_{it} = 67.483585 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Blora

$$Y_{it} = 65.062803 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Rembang

$$Y_{it} = 68.986644 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Pati

$$Y_{it} = 65.930016 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Kudus

$$Y_{it} = 68.682228 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Jepara

$$Y_{it} = 66.89996 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Demak

$$Y_{it} = 68.174597 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Semarang

$$Y_{it} = 68.352712 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Temanggung

$$Y_{it} = 64.171675 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Kendal

$$Y_{it} = 66.710546 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Batang

$$Y_{it} = 62.306793 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Pekalongan

$$Y_{it} = 65.260836 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Pemasang

$$Y_{it} = 62.756075 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kabupaten Tegal

$$Y_{it} = 61.853173 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

kabupaten Brebes

$$Y_{it} = 63.989032 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kota Magelang

$$Y_{it} = 73.461901 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kota Surakarta

$$Y_{it} = 77.457804 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kota Salatiga

$$Y_{it} = 76.207733 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kota Semarang

$$Y_{it} = 73.682296 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kota Pekalongan

$$Y_{it} = 68.030314 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Kota Tegal

$$Y_{it} = 69.455276 + 0.00000457 X_{1it} - 0.015093 X_{2it} - 0.355638 X_{3it} + 0.218565 X_{4it} + E_{it}$$

Pada Tabel 5.0 diatas menunjukkan Konstanta masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten dengan Konstanta tertinggi adalah Surakarta sebesar 16.140957 dan kabupaten dengan Intersep terendah adalah kabupaten Tegal 0.536326.

4.7 Analisis Hasil Regresi

4.7.1 Uji F (Uji Serempak)

Uji F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen, atau melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama. Dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel, $F\text{-tabel} = (\alpha : k-1, n-k)$, $\alpha = 0,05$ ($5-1 = 4$; $175-4 = 171$).

Hasil perhitungan yang didapat adalah F hitung = 235.6323, sedang F tabel = 2.37. Dari hasil perbandingan antara F hitung dan F tabel, menunjukkan nilai F hitung > F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan kata lain variabel Tingkat Pengangguran, Tingkat kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat kepercayaan 84%.

Selain itu, nilai Prob. F-statistik adalah 0.000000. nilai ini lebih kecil dari tingkat kesalahan ($\alpha=5$ persen atau 0,05) yang berarti menolak H_0 dan menerima H_1 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (variabel Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum) bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia).

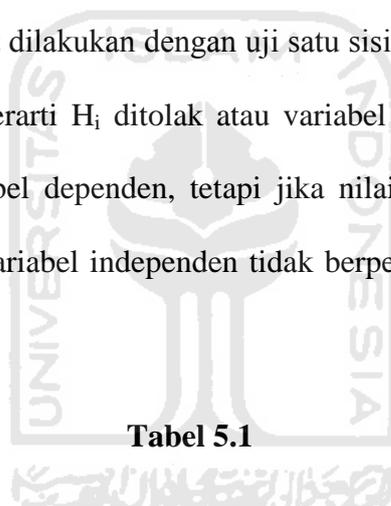
4.7.2 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi, atau dengan kata lain angka

tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang telah diestimasi dengan data sesungguhnya. Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi Random Effect menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.847195 yang berarti bahwa sebanyak 84.71 % variasi atau perubahan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model, sedangkan sisanya (15.29%) dijelaskan oleh variabel model yang lain

4.7.3. Uji Statistika T

Uji t statistik dapat dilakukan dengan uji satu sisi dengan $\alpha = 5\%$. Jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel berarti H_1 ditolak atau variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika nilai t hitung $<$ nilai t tabel berarti H_1 diterima atau variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Tabel 5.1

Hasil Uji t Statistik

Variabel	Coeffisient	Prob	t-statistik	t-tabel	Keterangan
Upah Minimum	4.57E-06	0.0000	10.85001	1.645	Signifikan
Tingkat Pengangguran	-0.015093	0.5259	-0.635649	1.645	Tidak Signifikan
Tingkat Kemiskinan	-0.355638	0.0000	-7.537801	1.645	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	0.218565	0.0000	5.066302	1.645	Signifikan
dengan $\alpha:5\%$ n:170 t-tabel= (α , n-k) k=5					

1. Hipotesis pengaruh variabel Upah Minimum terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah:

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 = 0$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Variabel Upah Minimum mempunyai nilai t-statistik sebesar (10.85001) > (1.671) t-tabel, maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai probabilitas sebesar (0.0000) dengan tingkat keyakinan sebesar 84%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel Upah Minimum secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai koefisien variabel Upah Minimum adalah 0,00000457 sehingga dapat diartikan jika Upah Minimum mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0,00000457 Rupiah.

2. Hipotesis pengaruh variabel Tingkat Pengangguran terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah:

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 = 0$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Variabel Tingkat Pengangguran mempunyai nilai t-statistik sebesar $(-0.635649) < (1.671)$ t-tabel, maka H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai probabilitas sebesar (0.5259) dengan tingkat keyakinan sebesar 84%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel Tingkat Pengangguran secara individual berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Hipotesis pengaruh variabel Tingkat Kemiskinan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah:

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 = 0$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Variabel Tingkat Kemiskinan mempunyai nilai t-statistik sebesar $(-7.537801) > (1.671)$ t-tabel, maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai probabilitas sebesar (0.0000) dengan tingkat keyakinan sebesar 84%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan secara individual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan.. Nilai koefisien variabel Tingkat Kemiskinan adalah -0.355638 sehingga dapat diartikan jika Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar -0.355638 %.

4. Hipotesis pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel Indeks Pembangunan manusia adalah:

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 = 0$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai nilai t-statistik sebesar $(5.066302) > (1.671)$ t-tabel, maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai probabilitas sebesar (0.0000) dengan tingkat keyakinan sebesar 84%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah 0.218565 sehingga dapat diartikan jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik sebesar 0.218565 %.

4.8 Pengujian Hipotesis

4.8.1. Upah Minimum Kabupaten/kota Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Hasil pengujian regresi data panel pada penelitian ini menggunakan metode *Random Effect* menunjukkan nilai t-statistik variabel Upah Minimum Kabupaten/kota sebesar 10.85001. Nilai t-tabel dengan penggunaan α 5 persen diperoleh angka 1.645 sehingga nilai t-statistik $>$ t-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Chalid dkk (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

4.8.2 Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Hasil regresi didapatkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Hasil pengujian regresi pada data panel ini dengan menggunakan metode *Random Effect* dimana metode ini menunjukkan nilai t-statistik variabel Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -0.635649 nilai t-tabel dengan $\alpha = 5$ persen diperoleh angka 1.645 sehingga nilai t-statistik $<$ t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel belanja Tingkat Pengangguran Terbuka secara individu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Baeti (2013) yang

menyatakan bahwa Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Karena tingkat kenaikan angka pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM atau menurunkan angka indeks pembangunan manusia, orang sedang menganggur atau sedang tidak bekerja bukan berarti akan hilang kesejahteraan walaupun sedang menganggur karena pengangguran masih bisa mencari pekerjaan disuatu tempat.

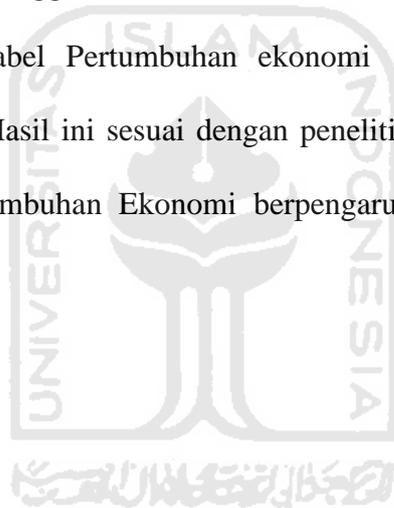
Pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM karena orang yang sedang menganggur belum tentu dia miskin, bisa saja orang menganggur akan tetapi warisan orang tersebut banyak atau anak orang kaya, maka akan tetap sejahtera seperti tercukupinya kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan walaupun tidak bekerja

4.8.3 Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Hasil regresi didapatkan bahwa variabel Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Hasil pengujian regresi pada data panel ini dengan menggunakan metode *Random Effect* dimana metode ini menunjukkan nilai t-statistik variabel Kemiskina sebesar -7.537801 nilai t-tabel dengan $\alpha=5$ persen diperoleh angka 1.645 sehingga nilai t-statistik > t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai IPM. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mirza (2012) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

4.8.4 Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Hasil regresi didapatkan bahwa variabel pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Hasil pengujian regresi pada data panel ini dengan menggunakan metode *Random Effect* dimana metode ini menunjukkan nilai t-statistik variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.066302 nilai t-tabel dengan $\alpha = 5$ persen diperoleh angka 1.645 sehingga nilai t-statistik > t-tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Hasil ini sesuai dengan penelitian Maulana (2013) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang menggunakan aplikasi eviews 8 terhadap hipotesis yang telah disusun sebagaimana telah diatur dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum secara individu berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Ini berarti bahwa ketika Upah Minimum meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya.
2. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara individu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Ini berarti bahwa ketika ketika tingkat pengangguran naik maka IPM turun. Karena tingkat kenaikan angka pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM atau menurunkan angka indeks pembangunan manusia, orang sedang menganggur atau sedang tidak bekerja bukan berarti akan hilang kesejahteraan walaupun sedang menganggur karena pengangguran masih bisa mencari pekerjaan disuatu tempat.

Pengangguran tidak berpengaruh terhadap IPM karena orang yang sedang menganggur belum tentu dia miskin, bisa saja orang menganggur akan tetapi warisan orang tersebut banyak atau anak orang kaya, maka akan tetap sejahtera seperti tercukupinya kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan walaupun tidak bekerja.

3. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Ini berarti bahwa ketika Tingkat Kemiskinan Meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah demikian pula sebaliknya jika Tingkat Kemiskinan Masyarakat tinggi
4. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara individu berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Ini berarti bahwa ketika Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

1. Pemerintah terus berupaya meningkatkan upah minimum agar dapat mesejahterakan masyarakat. Karena dengan peningkatan upah maka daya beli masyarakat akan bertambah maka tercukupi asupan gizi bagi kesehatan, dan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik dan kesejahteraan dapat meningkat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri yang diukur pada (IPM)
2. Pemerintah harus selalu berupaya menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Tengah melalui mutu pendidikan yang terus ditingkatkan sebagai upaya pendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memberi pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan perekonomian dan mampu membuka lapangan berdaya saing dalam dunia pekerjaan ataupun ketika tidak mendapat pekerjaan mereka bisa membuka usaha sendiri agar mengurangi tingkat pengangguran.
3. Pemerintah harus selalu berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Jawa Tengah yang diukur pada (IPM)
4. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Frid. (2010), “Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007”, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- BAPPEDA Provinsi Riau 2011. Analisis Statistik Perencanaan Pembangunan. Pekanbaru, Riau
- Baeti, N.. (2013). “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011” *Economics Development Analysis Journal*, 2 (3) (2013).
- Burhanudin, M. (2015), “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Banten Periode (2008-2013)”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006. Jakarta Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2010. “Statistik Indonesia” (1999). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chalid, N. & Y Yusbar (2014). “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan

- ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi RIAU”.
Jurnal Ekonomi. Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.
- Feriyanto, Nur (2014) Ekonomi Sumber Daya Manusia. UPP STIM YKPN, jln.
Palagan Tentara Pelajar Km.7 Yogyakarta.
- Ginting S, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, Dan Kasyful Mahalli. 2008.
“Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhinya”. Jurnal Perencanaan& Pengembangan Wilayah,
Vol.4, No.1, Agustus 2008. Hal 17-24
- Gujarati, Damodar N Dan Dawn C. Porter (2013), “ Dasar-Dasar Ekonometrika
Buku 1 Edisi Kelima”, Salemba Empat, Jakarta.
- Iksan, Mohamad. 2010. Upah Minimum Regional dan Kesempatan Kerja.
Mencari Jalan Tengah.<http://els.bappenas.go.id>. Diakses tanggal 27
Januari 2010.
- Jhingan, M.L, 2003, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Penerjemah
D.Guritno, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, (2010). Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta:
UPP STIM YKPN.
- Kartasapoetra, G. Dkk. 1992. Administrasi Perusahaan Industri, Cetakan kedua.
Bumi Aksara. Jakarta.
- Mirza,D.. (2012), “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Eekonomi, Dan Belanja
Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun
2006-2009”. Economics Development Analysis Journal,1 (1)(2012).

- Maulana, R. & B.Prasetyo (2013), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Tekhnologi Terhadap IPM Provinsi di INDONESIA 2007-2011, “Journal of Economics and Policy, Jejak 6 (2) (2013): 103-213.
- Riana, Nanda Usa. (2012), “Analisis Variabel Variabel yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2002-2009” Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Saputra, Whisnu Adhi. (2011), “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah.
- Sriyana. Jaka (2014), Metode Regresi Data Panel, Ekonisia , Yogyakarta
- Sukirno, Sadono.2000, Makro Ekonomi Modern, Penerbit PT Raja Grafindo Persada,
- _____.2006.Pengantar TeoriMakro Ekonomi . Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- _____. 2008. Mikro Ekonomi.Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004, Makro Ekonomi.Teori Pengantar.Cetakan Ke limabelas. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.JMPK Vol 08, (No. 03) : 121-129. Tersedia: www.Scribd.com. Diakses tanggal 12 Desember 2013.
- Todaro. Michael P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga. Jakarta

Utomo, Ginanjar Budhi.(2015), "*Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta Tahun 2004 – 2013*", Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.

UNDP, Human Development Report 1995. www. google.com

Widarjono, Agus (2013), "*Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews*", UPP STIM YKPN, Yogyakarta

_____, (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi kedua. Ekonisa FE UII, Yogyakarta.

_____, (2009).*Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*.UIIYogyakarta:
Ekonisia



LAMPIRAN

Lampiran I

Estimasi Output Hasil Regresi PLS

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/02/16 Time: 10:44				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.79711	3.219898	21.05567	0.0000
X1	5.15E-06	2.20E-06	2.341029	0.0204
X2	0.029954	0.133581	0.224238	0.8228
X3	-0.588803	0.065870	-8.938873	0.0000
X4	0.775739	0.300792	2.578984	0.0108
R-squared	0.473080	Mean dependent var		68.02234
Adjusted R-squared	0.460682	S.D. dependent var		4.765990
S.E. of regression	3.500062	Akaike info criterion		5.371594
Sum squared resid	2082.574	Schwarz criterion		5.462016
Log likelihood	-465.0144	Hannan-Quinn criter.		5.408272
F-statistic	38.15738	Durbin-Watson stat		0.052951
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran II

Estimasi Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/02/16 Time: 10:45				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.48125	1.068568	63.15108	0.0000
X1	4.80E-06	4.36E-07	10.99189	0.0000
X2	-0.017799	0.023818	-0.747276	0.4562
X3	-0.321718	0.050003	-6.433986	0.0000
X4	0.214405	0.043188	4.964509	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994885	Mean dependent var	68.02234	
Adjusted R-squared	0.993456	S.D. dependent var	4.765990	
S.E. of regression	0.385544	Akaike info criterion	1.125259	
Sum squared resid	20.21559	Schwarz criterion	1.830555	
Log likelihood	-59.46020	Hannan-Quinn criter.	1.411347	
F-statistic	696.1414	Durbin-Watson stat	1.382887	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.8, 2016.

Lampiran III

Estimasi Output Hasil Regresi *Random Effect Model*

5.

Dependent Variable: Y					
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)					
Date: 12/02/16 Time: 10:46					
Sample: 2010 2014					
Periods included: 5					
Cross-sections included: 35					
Total panel (balanced) observations: 175					
Swamy and Arora estimator of component variances					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	68.12983	1.185665	57.46126	0.0000	
X1	4.57E-06	4.21E-07	10.85001	0.0000	
X2	-0.015093	0.023745	-0.635649	0.5259	
X3	-0.355638	0.047181	-7.537801	0.0000	
X4	0.218565	0.043141	5.066302	0.0000	
Effects Specification				S.D.	Rho
Cross-section random			3.599666	0.9887	
Idiosyncratic random			0.385544	0.0113	
Weighted Statistics					
R-squared	0.847195	Mean dependent var	3.254471		
Adjusted R-squared	0.843600	S.D. dependent var	0.982771		
S.E. of regression	0.388661	Sum squared resid	25.67976		
F-statistic	235.6323	Durbin-Watson stat	1.107441		
Prob(F-statistic)	0.000000				
Unweighted Statistics					
R-squared	0.398622	Mean dependent var	68.02234		
Sum squared resid	2376.858	Durbin-Watson stat	0.011965		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.8, 2016.

Lampiran IV

Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: FE				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	408.072816	(34,136)	0.0000	
Cross-section Chi-square	811.108499	34	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/02/16 Time: 10:48				
Cow				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.79711	3.219898	21.05567	0.0000
X1	5.15E-06	2.20E-06	2.341029	0.0204
X2	0.029954	0.133581	0.224238	0.8228
X3	-0.588803	0.065870	-8.938873	0.0000
X4	0.775739	0.300792	2.578984	0.0108
R-squared	0.473080	Mean dependent var	68.02234	
Adjusted R-squared	0.460682	S.D. dependent var	4.765990	
S.E. of regression	3.500062	Akaike info criterion	5.371594	
Sum squared resid	2082.574	Schwarz criterion	5.462016	
Log likelihood	-465.0144	Hannan-Quinn criter.	5.408272	
F-statistic	38.15738	Durbin-Watson stat	0.052951	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran V

Hasil Pengujian *Hausman Tes*

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: RE				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	6.760114	4	0.1491	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000005	0.000005	0.000000	0.0474
X2	-0.017799	-0.015093	0.000004	0.1485
X3	-0.321718	-0.355638	0.000274	0.0405
X4	0.214405	0.218565	0.000004	0.0379
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/02/16 Time: 10:49				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.48125	1.068568	63.15108	0.0000
X1	4.80E-06	4.36E-07	10.99189	0.0000
X2	-0.017799	0.023818	-0.747276	0.4562
X3	-0.321718	0.050003	-6.433986	0.0000
X4	0.214405	0.043188	4.964509	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994885	Mean dependent var	68.02234	
Adjusted R-squared	0.993456	S.D. dependent var	4.765990	
S.E. of regression	0.385544	Akaike info criterion	1.125259	
Sum squared resid	20.21559	Schwarz criterion	1.830555	
Log likelihood	-59.46020	Hannan-Quinn criter.	1.411347	
F-statistic	696.1414	Durbin-Watson stat	1.382887	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Konstanta Antar Daerah

Lampiran VI

Kabupaten/Kota	CROSSID	Effect	C	KONSTANTA
Kab. Cilacap	1	-1.393.597	68.12983	66.736233
Kab. Banyumas	2	1.815.169	68.12983	69.944999
Kab. Purbalingga	3	-0.44906	68.12983	67.68077
Kab. Banjarnegara	4	-3.907.771	68.12983	64.222059
Kab. Kebumen	5	-0.524352	68.12983	67.605478
Kab. Purworejo	6	2.166.563	68.12983	70.296393
Kab. Wonosobo	7	-0.950375	68.12983	67.179455
Kab. Magelang	8	-3.485.626	68.12983	64.644204
Kab. Boyolali	9	1.142.184	68.12983	69.272014
Kab. Klaten	10	4.678.290	68.12983	72.80812
Kab. Sukoharjo	11	3.058.614	68.12983	71.188444
Kab. Wonogiri	12	-1.984.039	68.12983	66.145791
Kab. Karanganyar	13	3.875.125	68.12983	72.004955
Kab. Sragen	14	1.769.327	68.12983	69.899157
Kab. Grobogan	15	-0.646245	68.12983	67.483585
Kab. Blora	16	-3.067.027	68.12983	65.062803
Kab. Rembang	17	0.856814	68.12983	68.986644
Kab. Pati	18	-2.199.814	68.12983	65.930016
Kab. Kudus	19	0.552398	68.12983	68.682228
Kab. Jepara	20	-1.229.870	68.12983	66.89996
Kab. Demak	21	0.044767	68.12983	68.174597
Kab. Semarang	22	0.222882	68.12983	68.352712
Kab. Temanggung	23	-3.958.155	68.12983	64.171675
Kab. Kendal	24	-1.419.284	68.12983	66.710546
Kab. Batang	25	-5.823.037	68.12983	62.306793
Kab. Pekalongan	26	-2.868.994	68.12983	65.260836
Kab. Pemasang	27	-5.373.775	68.12983	62.756075
Kab. Tegal	28	-6.276.657	68.12983	61.853173
Kab. Brebes	29	-4.140.798	68.12983	63.989032
Kota Magelang	30	5.332.071	68.12983	73.461901
Kota Surakarta	31	9.327.974	68.12983	77.457804
Kota Salatiga	32	8.077.903	68.12983	76.207733
Kota Semarang	33	5.552.466	68.12983	73.682296
Kota Pekalongan	34	-0.099516	68.12983	68.030314
Kota Tegal	35	1.325.446	68.12983	69.455276

Sumber: Data Eviews 8